



**SALINAN**

**WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 173 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON  
TAHUN 2023

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021- 2026 dan digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tomohon serta penyusunan Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 6 Februari 2023

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 173 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA  
TOMOHON TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya masyarakat religius yang saling menghargai dan memiliki karakter kebangsaan	Meningkatnya toleransi antar umat beragama dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta terlaksanya kehidupan berdemokrasi	1	Indeks Kerukunan Umat beragama / Indeks Kota Toleran	Skor	$\frac{\text{Nilai Total}}{\text{Responden} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \times 4 \text{ variabel}} \times 100$ Variabel 1 : Hubungan sosial Variabel 2 : Agama dan konflik Variabel 3 : Kebijakan Pemerintah Variabel 4 : Peran ormas	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	$\frac{\text{PDB rt} - \text{PDB rt-1}}{\text{PDB rt-1}}$	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON
			2	Indeks Gini	Poin	Data Dari BPS Kota Tomohon	DINAS SOSIAL
			3	Angka kemiskinan	%	Data Dari BPS Kota Tomohon	DINAS SOSIAL
		1	Indeks Pembangunan manusia	Angka	Data Dari BPS Kota Tomohon	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA TOMOHON	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			2	Tingkat Pengangguran terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100$	DINAS TENAGA KERJA
			3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	$\frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Manusia Laki-Laki}} \times 100$	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tomohon	1	Turunnya Angka stunting	%	$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting (PB/U atau TB/U dengan z-score kurang dari -2 SD)}}{\text{Jumlah balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)}} \times 100$	DINAS KESEHATAN
			2	Umur harapan hidup	Tahun	$\frac{\text{Jumlah semua umur orang yang meninggal}}{\text{Jumlah orang yang meninggal}} \times 100$	DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan Kota terpadu, berkualitas berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	1	Indeks infrastruktur	Indeks	$\frac{\text{Panjang drainase dalam kondisi baik (km) / pembuangan aliran air tidak tersumbat + Luas irigasi kota dalam kondisi baik + Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang seluruh drainase kota (km) + Luas irigasi kota + Panjang jalan kota seluruhnya}} \times 100$	DINAS PUPR
			2	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	$(0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			3	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$	DINAS PUPR

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			4	Akses air minum layak	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100$	DINAS PUPR
3	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan profesional	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	1	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Juta Rupiah	$\frac{\text{Realiasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Pariwisata}} \times 100$	DINAS PARIWISATA
			2	Lama tinggal wisatawan (length of stay)	Hari	$\frac{\text{Jumlah Kamar terjual}}{\text{Jumlah kunjungan menginap}} \times 100$	DINAS PARIWISATA
4	Terwujudnya peningkatan produksi komoditi pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1	Produktivitas bahan pangan	Kwa/ha	$\frac{\text{Jumlah produksi bahan pangan padi}}{\text{Jumlah Luas Panen sebelumnya}} \times 100$	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya ketahanan pangan	1	Cadangan beras Pemerintah Kota	Ton	'CBPK = 80% x Cadangan beras total provinsi x Ratio jumlah penduduk Kota Tomohon terhadap jumlah penduduk provinsi	DINAS PANGAN
			2	Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot masing-masing kelompok bahan pangan	DINAS PANGAN
5	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Kategori Penilaian dari KEMENPAN	SETDA KOTA TOMOHON (BAGIAN ORGANISASI)
			2	Opini terhadap laporan keuangan	WTP	Opini BPK	BPKPD
			3	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	Kategori Penilaian dari KEMENPAN	DINAS KOMINFO

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			4	Skor Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor	Kategori Penilaian dari KEMENDAGRI	SETDA KOTA TOMOHON (BAGIAN PEMERINTAHAN)
			5	Nilai SAKIP Kota	Nilai	Kategori Penilaian dari KEMENPAN	SETDA KOTA TOMOHON (BAGIAN ORGANISASI)

#### SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	1	Presentase dokumen evaluasi dan capaian pelaksanaan pemerintah, otonomi daerah kerjasama Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat		$\frac{\text{Jumlah dokumen evaluasi capaian pelaksanaan pemerintah, otonomi daerah kerjasama pemerintah daerah dan kesejahteraan rakyat}}{\text{Jumlah dokumen evaluasi}} \times 100$	BAG.KESRA
			2	Presentase dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa		$\frac{\text{Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja di perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa}}{\text{Jumlah dokumen evaluasi}} \times 100$	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA BAGIAN BARANG DAN JASA
			3	Jumlah paket kontruksi yang dibawah ke tahun berikutnya		$\frac{\text{Jumlah paket konstruksi yang dibawah ke tahun berikutnya}}{\text{Jumlah paket konstruksi}} \times 100$	BAGIAN BARANG DAN JASA
			4	Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif		$\frac{\text{Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan secara kompetitif}}{\text{Jumlah paket pengadaan}} \times 100$	BAGIAN BARANG DAN JASA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			5	Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan		$\frac{\text{Jumlah nilai belanja yang dilaksanakan melalui pengadaan}}{\text{Jumlah belanja pengadaan}} \times 100$	<b>BAGIAN BARANG DAN JASA</b>
			6	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai pelaksanaan RB Nasional tingkat Kabupaten/Kota: jumlah nilai RB kabupaten dan kota pada tahun bersangkutan dibagi jumlah populasi kabupaten dan kota dikali 100%.	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>
			7	Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		$\text{Indeks Capaian Kinerja} + \text{Indeks Kesesuaian Materi}$	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>
			8	Nilai SAKIP Kota		Kategori Penilaian dari KEMENPAN	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>
			9	Presentase pelaksanaan urusan pemerintah daerah		$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah}}{\text{Jumlah urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan}} \times 100$	<b>BAGIAN UMUM</b>
			10	Presentase urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar : Presentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja ; jumlah SOP pelayanan publik dan Perangkat Daerah		$\frac{\text{Jumlah urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar, presentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah, jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, jumlah SOP pelayanan Publik dan Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah sesuai dengan standar, presentase penyediaan pelayanan kerumahtanggaan Kepala}} \times 100$	<b>BAGIAN UMUM BAGIAN ORGANISASI</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
						Daerah/Wakil kepala Daerah, jumlah dokumen pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, jumlah SOP pelayanan Publik dan Perangkat yang dilaksanakan	

#### SEKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kinerja Fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Tomohon	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Tomohon	1	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditargetkan}} \times 100$	SEKWAN
2	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	2	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	%	$\frac{\text{Realisasi Program Dukungan Pelaksanaan Tugas DPRD}}{100 \text{ Program Dukungan Pelaksanaan Tugas DPRD yang ditargetkan}} \times$	SEKWAN

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik	1	Prosentase Tindak Lanjut Temuan	%	Capaian Tindak Lanjut Temuan hasil Rekonsiliasi BPK yang sesuai rekomendasi	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>
			2	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Hasil Self Assesment Inspektorat dan Key Assesment BPKP	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>
			3	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Hasil Self Assesment Inspektorat dan Key Assesment BPKP	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya Akses Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Tomohon	1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk 7-12 ke atas melek aksara}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun ke atas}} \times 100$	<b>DIKBUD</b>
			2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk 13-15 ke atas melek aksara}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun ke atas}} \times 100$	<b>DIKBUD</b>
			3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun}} \times 100$	<b>DIKBUD</b>
			4	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	<b>DIKBUD</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			5	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum pembelajaran muatan local	%	Jemlah satuan Pendidikan yang melaksanakan <u>Kurikulum muatan lokal X 100 %</u> Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum muatan lokal	<b>DIKBUD</b>
			6	Persentase ketersediaan pendidik berkualifikasi minimal S1	%	$\frac{\text{Jumlah Pendidik yang berijazah S1}}{\text{Jumlah Keseluruhan Tenaga Pendidik pada jenjang tertentu}} \times 100\%$	<b>DIKBUD</b>
			7	Persentase pengendalian perizinan pendidikan	%	$\frac{\text{Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah satuan Pendidikan secara keseluruhan pada jenjang tertentu}} \times 100\%$	<b>DIKBUD</b>
				Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	%	Ketersediaan layanan kepada masyarakat	<b>DIKBUD</b>
2	Terwujudnya kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata yang produktif dan profesional	Meningkatkan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	1	Persentase seni budaya yang dibina	%	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	<b>DIKBUD</b>
			2	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang dibina	%	$\frac{\text{Jumlah komunitas /sanggar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh Komunitas/sanggar budaya}} \times 100$	<b>DIKBUD</b>
			3	Persentase pembinaan pelestarian sejarah	%	$\frac{\text{Jumlah benda – benda bersejarah yang dipelihara}}{\text{Jumlah seluruh benda bersejarah}} \times$	<b>DIKBUD</b>
			4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah benda – benda cagar budaya yang ada}}{\text{Jumlah seluruh bendacagar budaya yang dilestarika}}$	<b>DIKBUD</b>

#### DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Yang adil, berkualitas dan Merata	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat kota Tomohon	1	Meningkatnya Umur Harapan Hidup	Tahun	Umur masing-masing yang meninggal dijumlahkan semuanya dan kemudian $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100$ dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun itu	<b>DINKES</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
			2	Menurunnya Angka Stunting	%	$\frac{\text{Jumlah Balita stunting (PB/U atau TB/U dengan z-score kurang dari -2 SD)}}{\text{Jumlah Balita yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			3	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Program dan kegiatan yang dilaksanakan ditahun berjalan}}{\text{Jumlah Program dan kegiatan ditahun berjalan}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			4	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	$\frac{\text{Jumlah fasilitas Kesehatan yang sudah terakreditasi}}{\text{jumlah fasilitas Kesehatan}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			5	Presenstase RS Rujukan tingkat Kota yang terakreditasi	%	$\frac{\text{Jumlah RS yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Rumah Sakit}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			6	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	$\frac{\text{Jumlah daya tampung Rumah Sakit Rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk Kota}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			7	Persentase ibu hamil mendapatakan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	<b>DINKES</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
			8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	<p>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas Kesehatan</p> $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas Kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	%	<p>Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar</p> $\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standard	%	<p>Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	<p>Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar</p> $\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100$	<b>DINKES</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			12	Persentase orang usia 15 – 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	<p>Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			13	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining sesuai standard	%	<p>Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standard	%	<p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100$	<b>DINKES</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standard	%	<p>Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}}{\text{Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			16	Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standard	%	<p>Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standard	%	<p>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	%	<p>Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun</p> $\frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100$	<b>DINKES</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			19	Rasio dokter per satuan penduduk	1:1000	$\frac{\text{Jumlah Dokter}}{\text{jumlah Penduduk}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			20	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	$\frac{\text{Jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan yang tersedia obat-obatan dan alat Kesehatan}}{\text{jumlah fasilitas pelayanan Kesehatan}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			21	Peningkatan Upaya dan media promosi kesehatan pada masyarakat lewat advokasi, pemberdayaan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam rangka promotif, preventif serta pengembangan UKBM yang ada	%	$\frac{\text{Jumlah kelurahan yang melakukan kegiatan promosi Kesehatan}}{\text{jumlah kelurahan}} \times 100$	<b>DINKES</b>
			22	Persentase kelurahan dan kecamatan sehat	%	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang memenuhi kategori kelurahan sehat}}{\text{jumlah kelurahan}} \times 100$	<b>DINKES</b>

#### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatkannya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan	1	Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang Jalan Seluruhnya}} \times 100\%$	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	$\frac{\text{Luas irigasi kota dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kota}} \times 100\%$	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		Lingkungan dan Berkelanjutan	3	Presentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di kota	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	
			4	Presentase Drainase dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat}}{\text{Panjang seluruh drainase kota}} \times 100\%$	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			5	Presentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	
			6	Ketaatan terhadap RTRW	%	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	

#### DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya infrastruktur dan pembangunan kota terpadu, berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	$\frac{\text{Laporan Hasil Kegiatan dan Monev Jumlah unit Rumah Tidak Layak hu}}{\text{Jumlah Total Unit}} \times 100\%$	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani Tahun } n}{\text{Jumlah Total rencana Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani Tahun } n} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Total rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani tahun } n}{\text{Jumlah Total rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani tahun } n} \times 100\%$	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH</b>
			3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	%	$\frac{\text{Rumah tangga Penerima fasilitas Penggantian hak Atas Penguasaan Tanah dan / atau bangunan + Rumah tangga Penerima Subsidi uang Sewa + Rumah tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah tangga terkena relokasi Program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan}} \times 100\%$	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH</b>
			4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah yang sedang di bangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah Unit Rumah Kota}} \times 100\%$	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH</b>
			5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	$\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha yang ditangani}}{\text{Luas bawah Kawasan Permukiman Kumuh di 10 ha}} \times 100\%$	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH</b>

**SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA DAERAH KOTA TOMOHON**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	
1	Terwujudnya Masyarakat Religius yang Saling Menghargai dan Memiliki Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama Dan Terpeliharanya Keamanan Dan Ketertiban dalam Kehidupan Bermasyarakat Serta Terlaksananya Kehidupan berdemokrasi.	1.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	$\frac{\text{pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan}} \times 100\%$ <i>jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan</i> <i>teridentifikasi oleh SATPOL PP</i>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
			2.	Persentase Penegakan Perda	%	$\frac{\text{jumlah penyelesaian penegakan perda}}{\text{jumlah pelanggaran perda}} \times 100\%$	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
2	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas Adil dan Merata	Meningkatnya Infrastruktur Dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan.	3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	$\frac{\text{jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time)}}{\text{jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
			4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	%	<i>kasus kebakaran di WMK tertangani dalam waktu maksimal 15 menit setelah laporan diterima</i>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
3	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	5	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%	<i>cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah dalam 1 tahun</i>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>

**DINAS SOSIAL DAERAH KOTA TOMOHON**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>SATUAN</b>	<b>FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Persentase penanganan kualitas dan kemampuan bagi PMKS	Meningkatnya jaminan sosial bagi PMKS	1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100$	<b>DINAS SOSIAL</b>
2	Persentase taraf kesejahteraan dan ketahanan sosial bagi PMKS	Meningkatnya penanganan potensi sumber kehidupan PMKS	2	Persentase PMKS yang tertangani	Orang	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$	<b>DINAS SOSIAL</b>
3	Persentase kemampuan dan kepedulian bagi PMKS	Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana sosial bagi PMKS		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100$	<b>DINAS SOSIAL</b>
4	Persentase kemandirian dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Meningkatnya kualitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelompok bagi PMKS		Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Orang / Klmpk	$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}} \times 100$	<b>DINAS SOSIAL</b>
5	Persentase perlindungan dan penanganan serta kepedulian bagi korban bencana yang mendapat bantuan	Meningkatnya penanggulangan korban bencana bagi korban bencana yang dibantu		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Orang	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}} \times 100$	<b>DINAS SOSIAL</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
6	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana alam dan sosial		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Orang	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala}} \times 100$	DINAS SOSIAL
7	Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar yang mandiri dan terampil serta terpenuhinya kebutuhan dasarnya	Meningkatnya kemandirian penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Orang	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}} \times 100$	DINAS SOSIAL

#### DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM	1.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}} \times 100\%$	DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA TOMOHON
			2.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$	DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA TOMOHON
			3.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	%	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	<b>DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	<b>DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA TOMOHON</b>
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pembangunan Kota Terpadu, Berkualitas, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	6.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	<b>DINAS TENAGA KERJA DAERAH KOTA TOMOHON</b>

#### **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak.	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			2	Indeks Pembangunan Gender	%	$\frac{\text{IPM perempuan}}{\text{IPM laki-laki}} \times 100\%$	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			3	Persentase Perangkat Daerah/ Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan	%	Jumlah Perangkat Daerah / Lembaga yang difasilitasi untuk mendapatkan Kota Layak Anak	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN</b>

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>SATUAN</b>	<b>FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	
	Manusia dan Indeks Gini			Kota Layak Anak		Jumlah Perangkat Daerah / Lembaga x 100 %	<b>PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA TOMOHON</b>	
4			Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	%	Jumlah Perempuan menikah usia <18 tahun	Jumlah Perempuan usia 20-24 tahun		<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA TOMOHON</b>
5					Rasio Keluarga yang memahami Kesetaraan dan Keadilan Gender (Per 100.000 KK)			
6			Persentase Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	%		Jumlah Perangkat Daerah / Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak yang diperbaharui secara berkala	Jumlah Perangkat Daerah/Lembaga Penyedia Data Gender dan Anak x 100%	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA TOMOHON</b>
7					Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	%		
8			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	%			Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Khusus Anak X100%

**DINAS PANGAN DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1	Cadangan beras pemerintah kota	TON	$CBPK = 80\% \times \text{Cadangan beras total provinsi} \times \text{Ratio jumlah penduduk Kota Tomohon terhadap jumlah penduduk provinsi}$	<b>DINAS PANGAN DAERAH</b>
			2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	SKOR	$PPH = \text{Persentase AKG} \times \text{Bobot masing-masing kelompok pangan}$	<b>DINAS PANGAN DAERAH</b>
			3	Rasio ketersediaan infrastruktur kedaulatan dan kemandirian pangan	RASIO	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur terbangun}}{\text{Jumlah kecamatan}}$	<b>DINAS PANGAN DAERAH</b>
			4	Persentase ketersediaan/konsumsi pangan utama per tahun	PERSEN	$\frac{\text{Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	<b>DINAS PANGAN DAERAH</b>
			5	Prosentasi penanganan angka kerawanan pangan	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan} - \text{Jumlah peta direalisasikan}}{\text{Jumlah target peta ditetapkan}} \times 100\%$	<b>DINAS PANGAN DAERAH</b>
			6	Cakupan pengawasan pangan segar asal tumbuhan	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dipedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	<b>DINAS PANGAN DAERAH</b>
			7	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	PERSEN	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	<b>DINAS PANGAN DAERAH</b>

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas adil dan merata	Meningkatnya infrastruktur dan pembangunan kota terpadu, berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	$(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, PPLH, dan PULH yang diterbitkan pemerintah daerah kota	%	Jumlah kegiatan usaha yang taat terhadap ijin lingkungan ----- X 100 Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			3	Presentase terlaksananya program penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani ----- X 100 Total jumlah pengaduan masyarakat	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			4	Presentase pengelolaan persampahan	%	Jumlah volume sampah yang ditangani (m3) ----- X 100 Total volume sampah (m3)	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			5	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	%	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan ----- X 100 Jumlah seluruh kegiatan	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TOMOHON</b>

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan di Kota Tomohon	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas laporan pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi public	1	Kepemilikan KTP Elektronik	%	$\frac{\text{Penduduk yang memiliki KTP-el}}{\text{Penduduk Wajib KTP-el}} \times 100$	<b>DINAS KEPENDUDUKAN &amp; PENCATATAN SIPIL</b>
			2	Persentase Kepemilikan KIA	%	$\frac{\text{Penduduk yang memiliki KIA}}{\text{Penduduk usia (<17) belum Nikah}} \times 100$	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>SATUAN</b>	<b>FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
			3	Perekaman KTP Elektronik		Sudah	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
			4	Rasio kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	%	$\frac{\text{Jumlah Akta Kelahiran (0-18 Tahun)}}{\text{Jumlah Anak (0-18 tahun)}} \times 100$	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
			5	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	$\frac{\text{Jumlah Permohonan Akta Mati}}{\text{Akta Kematian Yang Dikeluarkan}} \times 100$	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
			6	Persentase Kepemilikan Akta Nikah	%	$\frac{\text{Jumlah Permohonan Akta Nikah}}{\text{Akta Nikah yang dikeluarkan}} \times 100$	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
			7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melakukan perjanjian Kerjasama}}{\text{Jumlah OPD Kota Tomohon}} \times 100$	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
			8	Profil Kependudukan Kota Tomohon		Ada	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas, Adil dan Merata	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatnya Keluarga Sejahtera	1  Total Fertility Rate/TFR		TFR  $= 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA TOMOHON
			2  Laju Pertumbuhan Penduduk		$\frac{\text{(Lahir-Mati)}}{\text{PO (Jumlah Penduduk Awal)}} \times 100\%$	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA TOMOHON
			3  Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern, Modern Contraceptive Rate (mPCR)		$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA TOMOHON
			4  Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		$\frac{\text{Jumlah PUS yg ingin Ber-KB Tetapi Tidak Terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA TOMOHON
			5  Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		$ASFR_i = \frac{i}{f} \times k$	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			6	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita		$M9 = \frac{(X_0) - F(X_1)}{(X_0) - F(X_1)}$	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA TOMOHON
			7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		$\Sigma \text{ Indeks Komposit (Cakupan Data + Tepat Waktu Data + Akurasi Data + Pemanfaatan Data)}$	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KOTA TOMOHON

#### DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terlaksanannya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas, adil, dan merata	Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan kota terpadu, berkualitas berwawasan lingkungan dan beerkelanjutan	1	Rasio Konektivitas Kota	Nilai	<u>Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek</u> jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) (Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu) bobot= 0.5)	DISHUB
			2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Kota	Nilai	V/C Ratio di Jalan Kota lebih kecil dari 0,63  <u>V= Volume Kendaraan</u>  <u>C = Kapasitas Jalan</u>	DISHUB

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	Terlaksananya Refomasi Birokrasi yang Efektif dan efisien	Melaksanakan Reformasi dan Meujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik	3	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	Terwujudnya Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah (100%)	<b>DISHUB</b>

#### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Indeks SPBE	Indeks	Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kota Tomohon tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian Pemerintah Pusat terhadap penerapan SPBE tahun 2023 yang dikeluarkan secara resmi oleh Pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Pihak Kemenpan RB	<b>DISKOMINFO</b>
			2	Cakupan Pengelolaan Aplikasi Informatika	%	Jumlah aplikasi yang terbangun dan dikelola oleh Dinas Kominfo pada tahun 2023 dibagi  X 100 total Target jumlah aplikasi yang terbangun di tahun 2023	<b>DISKOMINFO</b>
			3	Jumlah Ketersediaan layanan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo bagi masyarakat	%	Jumlah Titik Hotspot Wifi yang terbangun dan tersebar serta dibiayai oleh Dinas Kominfo sebagai Pusat Penyediaan internet gratis bagi masyarakat di tahun	<b>DISKOMINFO</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			4	Cakupan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	%	$\frac{\text{Jumlah Media Pemberitaan yang dikelola oleh Kominfo serta media swasta lainnya yang telah menyebarluaskan informasi}}{\text{dibagi total jumlah target Media yang akan dikelola oleh Dinas Kominfo dan Media yang ditargetkan bekerja sama dengan Pihak Pemerintah Kota dikali 100}} \times 100$	DISKOMINFO
			5	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	%	Prosentase Jumlah Keseluruhan Kegiatan Rutin Kantor	DISKOMINFO

#### DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil dan merata	Meningkatnya perekonomian kota Tomohon	1.	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	%	$\frac{\text{Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah Anggota koperasi yang Koperasinya diperiksa dan diawasi}} \times 100 \%$	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			2.	Jumlah Usaha UMKM yang difasilitasi	Pelaku Usaha UMKM	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi bantuan pengembangan usaha sarana dan prasarana	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			3.	Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat	Pelaku Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan pelatihan peningkatan kualitas	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			4.	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada}} \times 100\%$	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
1.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, adil, dan merata	Meningkatnya perekonomian Kota Tomohon	1.	Meningkatnya nilai realisasi investasi PMDN/ PMA di Kota Tomohon	%	$\frac{\text{Nilai Investasi Tahun N} - \text{Nilai investasi tahun N-1}}{\text{Nilai investasi tahun N-1}} \times 100\%$	<b>DPMPTSPD</b>
			2.	Jumlah Investor PMDN/PMA	PMDN/PMA	Jumlah Investor PMDN/PMA	<b>DPMPTSPD</b>
			3.	Jumlah nilai investasi berskala nasional	Rupiah	Jumlah nilai investasi	<b>DPMPTSPD</b>
			4.	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja}}{\text{Jumlah Perusahaan}}$	<b>DPMPTSPD</b>
			5.	Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	<b>DPMPTSPD</b>
			6.	Rata-Rata Lamanya Proses Pelayanan Perizinan/non Perizinan	Hari	Nilai rata-rata pelayanan perizinan	<b>DPMPTSPD</b>

**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas Adil dan Merata	Meningkatnya Kualitas dan Daya saing SDM	1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		Jmlh Pemuda (16 – 30 thn) yg menjadi agt aktif pada Organisasi kepemudaan & Orgns Sosial Kemasyarakatan di kota Tomohon dibagi Jmlh Pemuda yg aktif berOrganisasi X 100 %	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi		Jmlh Pemuda(16 –30 thn) yg berwirausaha di kota Tomohon Dibagi Jlh Pemuda (Umr 16 – 30 Thn di Kota Tomohon ) X 100 %	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA DAERAH KOTA TOMOHON</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			3	Prosentase Organisasi Pramuka Yang Aktif		Jumlah Organisasi Kepramukaan yg aktif dibagi Jmlh Organisasi Kepramukaan X 100 %	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			4	Prosentase Peningkatan Prestasi Olahraga		Jmlh Atlit Olahraga berprestasi dibagi Jmlh Atlit Olahraga yg ada di kt Tomohon X 100 %	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			5	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah		Jumlah laporan tambah jumlah bulan layanan yang terealisasi dibagi jumlah laporan tambah jumlah bulan layanan berdasarkan target capaian kinerja X 100%J	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH KOTA TOMOHON</b>

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan system kearsipan yang komperhensif dan terpadu serta pelayanan perpustakaan yang optimal	Meningkatkan system pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dalam meningkatkan gemar membaca pada masyarakat	1	Jumlah Perpustakaan	Buah	Jumlah Perpustakaan	<b>DINAS KEARSIPAN &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			2	Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun	Orang	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun ----- x100 Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	<b>DINAS KEARSIPAN &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			3	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah	<b>DINAS KEARSIPAN &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			4	Pembangunan Perpustakaan daerah	gedung	Pembangunan Perpustakaan Daerah	<b>DINAS KEARSIPAN &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			5	Persentase Perpustakaan Kelurahan	Jumlah	Jumlah Perpustakaan Kelurahan	<b>DINAS KEARSIPAN &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
2	Mewujudkan system kearsipan yang komperhensif dan terpadu serta pelayanan perpustakaan yang optimal	Meningkatkan kualitas system pengelolaan arsip sesuai perkembangan teknologi dan informasi dan Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional	1	Pengelolaan arsip secara baku	Kegiatan	Jumlah Perpustakaan	<b>DINAS KEARSIPAN &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			2	Peningkatan SDM pengelolah kearsipan		Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama Tahun ----- ----- Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	<b>DINAS KEARSIPAN &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			3	Persentase SKPD yang menerapkan e Arsip	Jumlah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah	<b>DINAS KEARSIPAN &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			4	Persentase Perangkat Daerah yang naskah dokumennya tersimpan dengan baik	Jumlah	Jumlah SKPD naskah dokumennya tersimpan dengan baik ----- x 100 % Jumlah SKPD	<b>DINAS KEARSIPAN &amp; PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>

**DINAS PARIWISATA DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Kota Tomohon sebagai tujuan wisata dunia melalui pengelolaan pariwisata dan kebudayaan yang produktif dan profesional	Meningkatnya kunjungan wisatawan dan pemajuan budaya lokal	1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Obyek	Jumlah obyek wisata penghasil PAD yang bertambah	<b>DINAS PARIWISATA</b>
			2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara}}{\text{Target kunjungan wisatawan mancanegara}} \times 100$	<b>DINAS PARIWISATA</b>
			3	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	%	$\frac{\text{Target pelaku EKRAF yang terundang}}{\text{Jumlah pelaku EKRAF yang mengikuti pelatihan}} \times 100$	<b>DINAS PARIWISATA</b>
			4	Lama tinggal wisatawan	hari	$\frac{\text{Jumlah Kamar terjual}}{\text{Jumlah kunjungan menginap}} \times 100$	<b>DINAS PARIWISATA</b>
			5	Peningkatan PAD dari sektor pariwisata	Rp.	Realisasi PAD - Target PAD	<b>DINAS PARIWISATA</b>

**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Daerah yang Memiliki Sistem Pertanian maju dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian / Perikanan	1	Ketersediaan Benih / Bibit Tanaman Hias	Pohon	254,616	<b>DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>
			2	Ketersediaan Benih / Bibit Ternak	Ekor	457,716	
			3	Revitalisasi Sarana Prasarana Pertanian (JUT, RJIT)	Meter	1,000	
			4	Revitalisasi Sarana Prasarana Pertanian (Embung, Irigasi Perpompaaan/Perpipaan,	Unit	12	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			Pembangunan Sumur Bor)			
			5 Ketersediaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) yang baik	Unit	459	
			6 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Produksi Komoditas Hortikultura (sayuran, cabe, wortel)	Ton	44,100	
			7 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Produksi Florikultura (Bunga Krisan)	Jutaan Tangkai	5.43	
			8 Produksi Buah Pisang	Ton	265	
			9 Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB (Produksi Jagung)	Ton	66,921	
			10 Kontribusi sektor perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB (Produksi Rata-rata / tahun) (Aren)	%	1.9	
			11 Produksi Padi per hektar	Ton	$\frac{\text{Jumlah Produksi Bahan Pangan Padi}}{\text{Jumlah Luas Panen}} \times 100$	
			12 Produksi bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Jagung, Kacang Tanah, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar)	Ton	77,754	<b>DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>
			13 Produksi Peternakan (Daging Sapi, Babi, Ayam)	Ton	4,366	
			14 Produksi Peternakan (Telur)	Butir	54,188,227	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			15	Cakupan Bina Kelompok Petani (Poktan)	KT	87	
			16	Ketersediaan Benih / Bibit Ikan	Ekor	2,662,666	<b>DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>
			17	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	483.82	
			18	Produksi Perikanan Olahan	Ton	570.5	
			19	Cakupan Bina Kelompok Perikanan (Podakan)	KT	12	

#### DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
<b>1</b>	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas, Adil Dan Merata	Meningkatnya Perekonomian Kota Tomohon	1	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (Iup/Siup Pusat Perbelanjaan Dan Iutm/Iuts/ Siup Toko Swalayan.	%	Jumlah Pelaku Usaha yang telah memiliki ijin sesuai ketentuan -----x 100% Jumlah Pelaku Usaha di Wilayah Kab/Kota	<b>DINAS PERDAGANGAN &amp; PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			2	Persentase Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Diwilayah Kerjanya.	%	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	<b>DINAS PERDAGANGAN &amp; PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			3	Koefisien Variasi Harga Bapok Antar Waktu.	%	$KV = \frac{S}{X} \times 100\%$ KV = Koefisien Variasi Harga Bapok Antar Waktu S = Standar Deviasi harga Bapok X = Harga rata-rata Bapok	<b>DINAS PERDAGANGAN &amp; PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			4	Cakupan Pengembangan Ekspor.	Produk	Jumlah Produk Potensi Ekspor Yang Dikembangkan	<b>DINAS PERDAGANGAN &amp; PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			5	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah Dan Berlaku.	%	$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera}} \times 100\%$ <b>dan teraulang diwilayah Kab/Kota</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN &amp; PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			6	Cakupan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.	%	$\frac{\text{Jumlah Produk Dalam Negeri Yang di Pasarkan di Toko Swalayan}}{\text{Jumlah Total Produk Yang di Pasarkan di Toko Swalayan}} \times 100\%$	<b>DINAS PERDAGANGAN &amp; PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			7	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah.	%	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	<b>DINAS PERDAGANGAN &amp; PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			8	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIP.	%	<p>Jika terdapat N indicator pembangunan industry dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indicator adalah (100/N)%</p> <p>Untuk masing-masing penilaian indicator adalah persentase capaian indicator dibagi target dikali (100/N)%</p> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indicator tersebut</p> <p>Capaian Target Tahapan Penyelesaian RPIK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Naskah Akademik (30%)</li> <li>- Tersusunnya Draft RanPerda RPIK (20%)</li> <li>- Draft RanPerda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat rekomendasi dinas yang membidangi Perindustrian di Provinsi (25%)</li> <li>- Persetujuan Draft RanPerda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)</li> <li>- Penetapan Perda RPIK (10%)</li> </ul> <p>Penilaian bersifat Akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK</p>	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			9	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan----- -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			10	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	%	1. Keterkinian Informasi Industri: - Tersedianya Informasi Industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya Informasi Industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan Informasi Industri (0%) 2. Kelengkapan Informasi Industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan penolong (10%) Nilai akhir adalah Akumulasi dari Kelengkapan dan Keterkinian Informasi Industri (1+2)	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan Institusi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Hebat	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan	1	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah		<u>Realisasi</u> Pagu dibagi Jumlah Pagu x 100 %	<b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		yang baik	2	Persentase Keterukuran dan Akurasi Dokumen Perencanaan Pembangunan		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan Kepala Daerah	<b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			3	Persentase Konsistensi dan Sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan		Jumlah Program/Kegiatan dalam dokumen RPJMD, RKPD dibagi Jumlah Program/Kegiatan dalam dokumen Renstra, Renja	<b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			4	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan		Jumlah Kelitbangan dalam RKPD dibagi Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD x 100%	<b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			5	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kelitbangan dalam renja PD x 100%	<b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			6	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		Jumlah Kebijakan Inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan x 100%	<b>BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TOMOHON</b>

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintahan	1	Tersedianya Sumber Daya yang Memadai Dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan	%	Jumlah ASN yang tersedia	BPKPD Kota Tomohon	
						Jumlah Kebutuhan ASN		X100%
				2	Tersedianya Sumber Daya yang Memadai Dalam Pengelolaan Keuangan	%	Jumlah Laporan Yang di buat	BPKPD Kota Tomohon
							Jumlah Laporan yang di Persyaratkan	
			Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	3	Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD	%	Target Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD	BPKPD Kota Tomohon
			Mengoptimalkan Potensi Pendapatan Daerah, Terutama dari Pajak dan Retribusi Daerah	4	Peningkatan PAD	%	Realisasi PAD (Pajak Daerah)	BPKPD Kota Tomohon
				5	(Pajak Daerah)		Target PAD (Pajak Daerah)	
				6	Peningkatan PAD	%	Realisasi PAD(Pajak dan Pendapatan Lain-Lain)	BPKPD Kota Tomohon
			7	(Pajak dan Pendapatan Lain-Lain)	Target PAD (Pajak dan Pendapatan Lain-Lain)		X 100%	
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	Pemberian Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	BPKPD Kota Tomohon		
		9	Peningkatan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	Jumlah LK sesuai SAP	BPKPD Kota Tomohon		
					Jumlah SKPD		X100%	
		10	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan meliputi LKPD, Laporan Keuangan Triwulan I,II dan III, Laporan Semesteran	%	Target Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	BPKPD Kota Tomohon		
					Waktu Pelaksanaan Penyampaian Laporan Keuangan		X100%	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			11	Ketepatan Waktu Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	%	$\frac{\text{Target Waktu Penetapan Perda}}{\text{Waktu Pelaksanaan Penetapan Perda}} \times 100\%$	<b>BPKPD Kota Tomohon</b>
			12	Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD	%	$\frac{\text{Target Waktu Penetapan Perda APBD}}{\text{Waktu Pelaksanaan Penetapan Perda APBD}} \times 100\%$	<b>BPKPD Kota Tomohon</b>
			13	Ketepatan Waktu Penetapan Perda Perubahan APBD	%	$\frac{\text{Target Waktu Penetapan Perda Perubahan APBD}}{\text{Waktu Pelaksanaan Penetapan Perda Perubahan APBD}} \times 100\%$	<b>BPKPD Kota Tomohon</b>
			14	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Dana Transfer	%	$\frac{\text{Target Waktu Penyampaian Laporan Dana Transfer}}{\text{Waktu Pelaksanaan Penyampaian Dana Transfer}} \times 100\%$	<b>BPKPD Kota Tomohon</b>
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15	Ketepatan Waktu Penyetoran PFK (Potongan Fihak Ketiga)	%	$\frac{\text{Target Waktu Penyetoran PFK}}{\text{Waktu Penyetoran PFK}} \times 100\%$	<b>BPKPD Kota Tomohon</b>
			16	Pengelolaan Kas Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel, <i>Auditable</i> dan Transparan	%	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan}}{\text{Target Rencana Kegiatan}} \times 100\%$	<b>BPKPD Kota Tomohon</b>
			17	Ketepatan Waktu Penyiapan Instrumen Dalam Penyusunan APBD	%	$\frac{\text{Target Waktu Penyiapan Instrumen}}{\text{Waktu Pelaksanaan Penyiapan Instrumen}} \times 100\%$	<b>BPKPD Kota Tomohon</b>
			18	Peningkatan Mutu Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	$\frac{\text{Realisasi Kegiatan Penatausahaan BMD}}{\text{Target Kegiatan Penatausahaan BMD}} \times 100\%$	<b>BPKPD Kota Tomohon</b>
			19	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	%	$\frac{\text{Target Waktu Penyusunan Lap. BMD}}{\text{Waktu Pelaksanaan Penyusunan Lap. BMD}} \times 100\%$	<b>BPKPD Kota Tomohon</b>
			20	Persentasi Penyelesaian Kepemilikan Barang Milik Daerah	%	$\frac{\text{Total Bukti Kepemilikan Aset}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	<b>BPKPD Kota Tomohon</b>

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efesian	Terwujudnya Pelayanan Pelayananan Administrasi Kepegawaian yang baik	1.	Persentase Penerapan Merit Sistem	%	$\frac{\text{Jumlah Aspek penerapan sistem merit yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh aspek sistem merit berdasarkan ketentuan}} \times 100$	<b>BKPSDMD</b>
			2.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	$\frac{\text{Jumlah Pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke Atas}}{\text{Jumlah Seluruh pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah}} \times 100$	<b>BKPSDMD</b>
		1.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	$\frac{\text{Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan Tenaga Kesehaan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)}} \times 100$	<b>BKPSDMD</b>	
		2.	Rasio Jabatan Fungsional (%) bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	$\frac{\text{Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{seluruh jumlah pegawai non fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)}} \times 100$	<b>BKPSDMD</b>	
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya ASN							

**BADAN PENANGGULANGSN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang handal mencakup Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	Terwujudnya kesiagaan oemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana	1	Prosentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	$\frac{\text{Jumlah Komunitas Penanggulangan Bencana yang dibina}}{\text{Jumlah Komunitas masyarakat Penanggulangan Bencana pada daerah rawan bencana}} \times 100$	<b>BADAN PENANGGULAN GSN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			2	Prosentase penanganan bencana	%	$\frac{\text{Jumlah bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100$	<b>BADAN PENANGGULAN GSN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			3	Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	%	$\frac{\text{Jumlah objek terdampak yang ditangani}}{\text{Jumlah keseluruhan objek terdampak}} \times 100$	<b>BADAN PENANGGULAN GSN BENCANA DAERAH KOTA TOMOHON</b>

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KOTA TOMOHON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya masyarakat Religius	Terjadinya Peningkatan Kesadaran hukum dan Politik	1	Prosentase Jumlah bertambahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	Persen	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang memahami tentang wasbang (145 Org)}}{\text{Jumlah Masyarakat yang di targetkan (145 Orang)}} \times 100\% = 100\%$	<b>BADAN KESBANGPOL DAERAH KOTA TOMOHON</b>

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	
			2	Cakupan meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya politik	Persen	Jumlah Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang berperan(6 Parpol) / Jumlah Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang ditargetkan(6 Parpol) x 100% = 100%	<b>BADAN KESBANGPOL DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			3	Presentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	Jumlah Organisasi masyarakat yang terawasi (48 Ormas) / Jumlah Organisasi Masyarakat yang menjadi target (48 Ormas) x 100% = 100%	<b>BADAN KESBANGPOL DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			4	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekosbud(3keg) / Target Keg Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Eksosbud(3keg) x 100% = 100%	<b>BADAN KESBANGPOL DAERAH KOTA TOMOHON</b>
			5	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	Jumlah Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan (18 keg) / Target Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional (18 keg) x 100% = 100%	<b>BADAN KESATUAN KESBANGPOL DAERAH KOTA TOMOHON</b>
		Terjadinya Peningkatan Kualitas antar Umat beragama	6	Indeks Kerukunan Umat Beragama / Index Kota Toleran	Persen	Formula ditetapkan oleh Institute	<b>BADAN KESBANGPOL DAERAH KOTA TOMOHON</b>

**KECAMATAN TOMOHON SELATAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif Dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja serta tata kelola Administrasi Pemerintahan yang baik di Kecamatan/Kelurahan	1	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%	Jumlah Kegiatan penunjang perangkat daerah yang dilaksanakan _____ X 100 Jumlah penunjang perangkat daerah yang di rencanakan	<b>KECAMATAN TOMOHON SELATAN</b>
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Jumlah angket IKM yg menyatakan baik _____ X 100 Jumlah angket IKM yang disebarakan	<b>KECAMATAN TOMOHON SELATAN</b>
			3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	Jumlah Sarana Prasarana yang dilaksanakan _____ X 100 Jumlah Kegiatan	<b>KECAMATAN TOMOHON SELATAN</b>
			4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	%	Jumlah kasus yang diselesaikan _____ X 100 Jumlah kasus yang masuk	<b>KECAMATAN TOMOHON SELATAN</b>
				Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	jumlah kegiatan Rakorev yg dilaksanakan _____ X 100 Jumlah kegiatan Rakorev	<b>KECAMATAN TOMOHON SELATAN</b>

**KECAMATAN TOMOHON UTARA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Melaksanakan Revormasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan	1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan _____ X 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan	<b>KECAMATAN TOMOHON UTARA</b>

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
		Yang Baik	2	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah	%	$\frac{\text{Jumlah kegiatan penunjang pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah penunjang pelayanan perangkat daerah yang direncanakan}} \times 100\%$	<b>KECAMATAN TOMOHON UTARA</b>
	3		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah angket IKM yang menyatakan baik}}{\text{Jumlah angket IKM yang dibagikan}} \times 100\%$	<b>KECAMATAN TOMOHON UTARA</b>	
	4		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	%	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat}} \times 100\%$	<b>KECAMATAN TOMOHON UTARA</b>	
	5		Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	$\frac{\text{Jumlah kegiatan rakorev yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan rakorev yang direncanakan}} \times 100\%$	<b>KECAMATAN TOMOHON UTARA</b>	

#### KECAMATAN TOMOHON TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Melaksanakan Reformasi dan Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) per jumlah kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan}}{x 100}$	<b>KECAMATAN TOMOHON TIMUR &amp; 5 KELURAHAN</b>
2			Cakupan Penunjang Pelayanan Daerah	%	Persentase Kegiatan Administrasi x 100	<b>KECAMATAN TOMOHON TIMUR &amp; 5 KELURAHAN</b>	
3			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Jumlah Kegiatan Peran serta Masyarakat dalam menunjang Program Pemerintah x 100	<b>KECAMATAN TOMOHON TIMUR</b>	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
			4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	%	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Ketentraman dan Ketertiban	<b>KECAMATAN TOMOHON TIMUR DAN LIMA KELURAHAN</b>
			5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan x 100	<b>KECAMATAN TOMOHON TIMUR</b>

#### KECAMATAN TOMOHON BARAT

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	1	Cakupan penunjang pelayanan perangkat daerah.	%	$\frac{\text{Jumlah Target Kegiatan}}{\text{Realisasi Kegiatan}} \times 100$	<b>KECAMATAN TOMOHON BARAT</b>
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan	%	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	<b>KECAMATAN TOMOHON BARAT</b>
			3	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah Target Kegiatan}}{\text{Realisasi Kegiatan}} \times 100$	<b>KECAMATAN TOMOHON BARAT</b>
			4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketertiban, keindahan)	%	$\frac{\text{Jumlah Target Kegiatan}}{\text{Realisasi Kegiatan}} \times 100$	<b>KECAMATAN TOMOHON BARAT</b>
			5	Presentase tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	%	$\frac{\text{Jumlah Target Kegiatan}}{\text{Realisasi Kegiatan}} \times 100$	<b>KECAMATAN TOMOHON BARAT</b>

**KECAMATAN TOMOHON TENGAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Melaksanakan Revormasi Birokrasi dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1	Cakupan Penunjang Pelayanan Perangkat Daerah	%	Persentase kegiatan administrasi X 100	<b>KEC. TOMOHON TENGAH</b>
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Total nilai persepsi per unsur per total unsur yang terisi x 100	<b>KEC. TOMOHON TENGAH</b>
			3	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik dan Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di rencanakan per jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan x 100	<b>KEC. TOMOHON TENGAH</b>
			4	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	%	Jumlah kegiatan penyelesaian ketentraman dan ketertiban	<b>KEC. TOMOHON TENGAH</b>
			5	Persentase Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan	<b>KEC. TOMOHON TENGAH</b>

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

WALIKOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK